

Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

Nana Diana

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author: Nana Diana, E-Mail: nana.diana@fe.unsika.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat. Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin dengan nilai signifikansi sebesar 0,754. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin dengan nilai signifikansi sebesar 0,03. Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengujian SPSS 16 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 2,482 lebih kecil dari Ftabel sebesar 3,12 dan nilai signifikansi uji F sebesar $0,09 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat..

Kata Kunci: Zakat Infaq Shodaqoh, Produk Domestik Bruto dan Jumlah Penduduk Miskin

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence between Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) and Regional Domestic Product (RDP) on the Number of Poor People in West Java Province. The distribution of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) funds does not have a significant effect on the Number of Poor People with a significance value of 0.754. Regional Domestic Product (RDP) has a significant effect on the number of poor people with a significance value of 0.03. The distribution of Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) funds and Regional Domestic Product (RDP) simultaneously have no effect on the number of poor people in West Java Province. Based on the results of the SPSS 16 test, it can be seen that the Fhitung value of 2.482 is smaller than the Ftabel value of 3.12 and the significance value of the F test is $0.09 > 0.05$, so H_0 is accepted and H_3 is rejected. Thus, it can be concluded that there is no simultaneous effect of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) and gross regional domestic product (GRDP) on the number of poor people in West Java Province.

Keywords: Zakat Infaq Shodaqoh, Gross Domestic Product, and Number of Poor People

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih dihadapi oleh negara-negara diseluruh dunia. Masalah kemiskinan yang dihadapi negara-negara ini biasanya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan pada akhirnya meningkat menjadi ketimpangan. Dalam banyak kasus kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada saat ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus di tempuh oleh pemerintah. Yang pertama melindungi keluarga dan kelompok

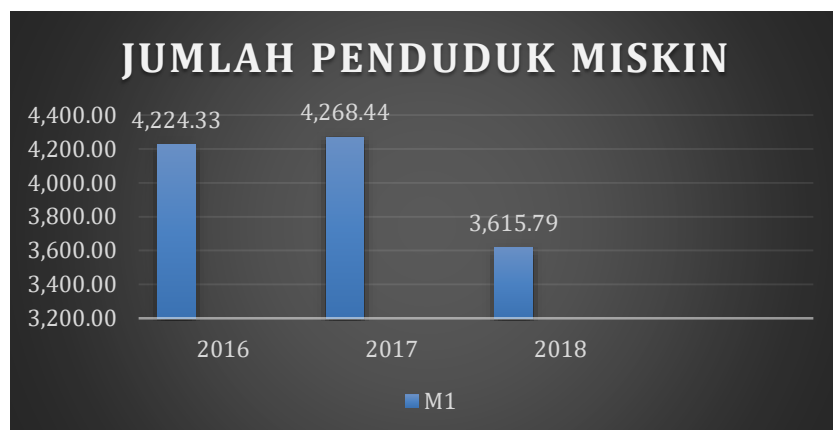
masyarakat miskin melalui pemenuhan pokok mereka. Yang kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang namun, negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya hanya terletak pada proporsi besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi. Dan serta tingkat kesulitan untuk mengatasi yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan dan semakin tinggi pula tingkat kesulitan untuk mengatasinya.

Permasalahan kemiskinan di Jawa Barat bukan hanya terjadi di daerah-daerah terpencil saja, faktanya banyak penduduk miskin juga tinggal di daerah perkotaan. Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sangat fluktuatif. Pada tahun 2015 angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.435.070 orang. Secara keseluruhan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 28.513.570 jiwa atau 11,22%.

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Adapun presentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 - 2018 ditunjukkan oleh tabel 1.1

Tabel 1. Jumlah Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 – 2018
(berdasarkan ratusan ribu jiwa)

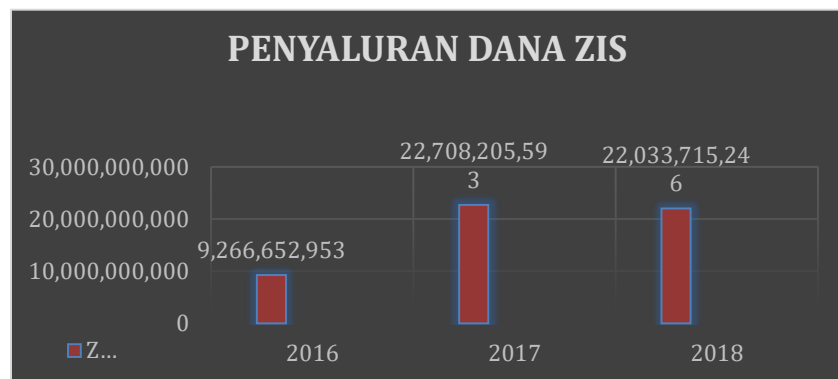


Pada Tabel 1 menunjukkan jumlah kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak merata dan sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Setiap tahunnya, jumlah kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Di tahun 2018 jumlah kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 415.020 orang dan kemiskinan terendah berada di Kota Banjar yaitu sebesar 10.410 orang. Pada tahun 2015 sampai 2018 jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan setiap tahunnya. Kecuali di Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan ditahun 2017 sebesar 1,7%. Dan mengalami penurunan ditahun berikutnya yaitu ditahun 2018 sebesar 5,31%.

Kebijakan khusus yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang direncanakan oleh pemerintah Jawa Barat, dilakukan melalui upaya Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 465/Kep.362-BPMD/2005 tanggal 29 April 2005 Tentang Perubahan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu Program (Penanggulangan) Kemiskinan Tingkat Nasional dan Khusus di Jawa Barat, meliputi: Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP), Program Jaring Pengaman Sosial, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dll. Sedangkan untuk Program Khusus (Penanggulangan) Kemiskinan, Provinsi Jawa Barat mengembangkan program-program seperti DAKALABAREA, Program Raksa Desa dan Program Pendanaan Kompetensi IPM (PPK-IPM). Berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan peranan pendayagunaan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Daerah (DAZDA) Provinsi Jawa Barat. Pendayagunaan dana ZIS mempunyai dua sifat, yaitu bersifat santunan dan bersifat bantuan. Bersifat santunan artinya pendistribusian dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan konsumtif. Sedangkan bersifat bantuan berarti pendistribusian dana tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya umat dengan kegiatan produktif, harapannya dana yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dapat memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan ketidakpemilikan sumber daya modal yang memadai.

Tabel 2. Penyaluran Dana ZIS Provinsi Jawa Barat 2016-2018



Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa angka penyaluran ZIS provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 22.033.715.246 rupiah. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan seperti kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, dan etnis.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makroekonomi yang paling krusial dalam mengukur pertumbuhan dan kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu dan mencerminkan kapasitas produktif daerah tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Secara konseptual, PDRB tidak hanya memberikan gambaran mengenai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan fiskal, serta evaluasi terhadap efektivitas alokasi sumber daya publik (BPS, 2022).

Berdasarkan pendekatan statistik, PDRB dihitung melalui tiga metode utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menilai struktur dan pergeseran ekonomi secara nominal, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi riil dari waktu ke waktu. Dengan demikian, peningkatan PDRB dari tahun ke tahun umumnya diinterpretasikan sebagai sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan menjadi indikator awal atas peningkatan taraf hidup masyarakat (Tangkilisan, 2005).

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, data PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2019), nilai

PDRB Jawa Barat pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.785 triliun dan meningkat menjadi Rp1.954 triliun pada tahun 2018. Kenaikan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang aktif dan potensi daerah yang terus berkembang. Secara teoritis, peningkatan PDRB diharapkan sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi empiris. Di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Purwakarta, angka kemiskinan justru mengalami kenaikan meskipun nilai PDRB meningkat. Fenomena ini menjadi anomali yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab secara teoritis terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan PDRB dengan jumlah penduduk miskin. Himawan Yudistira Dama et al. (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan PDRB seharusnya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin secara konsisten di seluruh wilayah.

Selain PDRB, sumber daya keuangan lain yang berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat adalah dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Ketiganya merupakan instrumen ekonomi Islam yang bersifat redistributif dan memiliki dimensi sosial yang kuat. Zakat merupakan kewajiban syariah yang dikenakan atas harta tertentu dan diperuntukkan bagi kelompok penerima yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Infaq dan shadaqah, meskipun bersifat sukarela, juga menjadi bagian penting dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi, terutama jika dikelola secara kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dapat berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengurangan beban hidup kelompok mustahik (penerima zakat). Menurut Sarwat (2019), zakat merupakan bentuk ibadah harta yang memiliki dimensi kemasyarakatan yang kuat karena mempertemukan antara pemilik kelebihan harta (muzakki) dan mereka yang berkekurangan (mustahik). Shadaqah dan infaq pun berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan distribusi kekayaan di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan daerah, ZIS bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen alternatif dalam kerangka ekonomi Islam untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkeadilan.

Akan tetapi, efektivitas penyaluran ZIS sebagai instrumen pengurangan kemiskinan masih menjadi perdebatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Purwakarta mencatat peningkatan signifikan dalam penyaluran dana ZIS, seiring dengan peningkatan nilai PDRB. Meskipun demikian, angka kemiskinan pada tahun yang sama justru mengalami kenaikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB dan kebijakan redistribusi berbasis ZIS dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan kemiskinan di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Purwakarta, juga tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas multidimensional. Harniati (2010) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi tiga jenis utama, yakni kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena keterbatasan sumber daya alam atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan kultural disebabkan oleh pola pikir yang menolak perubahan meskipun ada peluang untuk berkembang. Sementara itu, kemiskinan struktural timbul akibat ketimpangan dalam tatanan sosial, kebijakan pemerintah, atau akses terhadap sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, intervensi pengentasan kemiskinan tidak hanya cukup dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi dan penyaluran dana sosial, tetapi juga harus memperhatikan reformasi struktural dan pendekatan holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk, khususnya dalam dimensi kemiskinan, di Provinsi Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan PDRB dan penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika jumlah penduduk miskin, dan sejauh mana variabel-variabel tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan dalam strategi pembangunan sosial-ekonomi daerah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi empiris dalam menilai efektivitas intervensi ekonomi dan sosial dalam konteks pembangunan daerah berbasis nilai keislaman dan pendekatan ekonomi makro. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi penyaluran ZIS yang lebih terarah dan terintegrasi dengan indikator makro pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Pendekatan penelitian deskriptif menurut (Sugiono, 2020) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Sedangkan pendekatan penelitian verifikatif (Sugiono, 2020) adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, metode deskriptif verifikatif merupakan pengumpulan, mengolah, menganalisis dan menafsirkan data dalam statistik pengujian hipotesis. Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk menguji apakah Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah penduduk Provinsi Jawa barat, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut hasil pengujian instrumen penelitian:

Tabel 1. Hasil Uji t

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12687.464	1669.133		7.601	.000
ZIS	4.844E-7	.000	.036	.314	.754
PDRB	2.194E-5	.000	.241	2.135	.036

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

Sumber : Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai thitung pada setiap variabel. Untuk membuat kesimpulan menerima atau menolak H_0 terlebih dahulu harus ditentukan nilai ttabel yang akan digunakan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dan dengan menggunakan uji 2 sisi karena K-2 maka dapat diperoleh nilai ttabel ($df = n-k-1$) atau ($df = 78-2-1 = 75$) maka didapat nilai ttabel sebesar 1,99210.

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.159E8	2	2.580E8	2.482	.090a
Residual	7.794E9	75	1.039E8		
Total	8.310E9	77			

a. Predictors: (Constant), PDRB, ZIS

b. Dependent Variable: KEMISKINAN

Sumber : Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 2 diatas pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan terhadap Jumlah Kemiskinan diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,482. Adapun untuk mengetahui nilai Ftabel dengan signifikansi 5% dengan rumus $df = (K; n-k)$ atau sama dengan $df = (2; 78-2 = 76)$ maka didapat nilai Ftabel yaitu 3,12. Maka selanjutnya untuk mengetahui adanya pengaruh pengaruh atau tidak antara variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel sehingga di dapat $2,482 < 3,12$ dan nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,09 artinya lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.249a	.062	.037	1.019.402.368
a. Predictors: (Constant), PDRB, ZIS				
b. Dependent Variable: KEMISKINAN				

Sumber : Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji diatas, maka dapat diperoleh nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dalam kolom R square yaitu sebesar 0,062 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh sebesar 6,2 % terhadap variabel dependen yaitu Jumlah Penduduk Miskin, dan sisanya sebesar 93,8% Jumlah Kemiskinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

Hasil uji regresi parsial menunjukkan bahwa variabel zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat selama periode 2016–2018. Nilai statistik *t*-hitung sebesar 0,314 berada di bawah nilai *t*-tabel sebesar 1,99210, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,754 yang lebih besar dari ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan ZIS terhadap jumlah penduduk miskin tidak dapat diterima, atau dengan kata lain, secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara penyaluran ZIS dan pengurangan jumlah penduduk miskin di wilayah yang diteliti.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana ZIS pada periode tersebut belum optimal dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin secara sistematis atau berkelanjutan. Keterbatasan dalam manajemen distribusi, akuntabilitas program, serta kurangnya integrasi antara lembaga zakat dan program pengentasan kemiskinan pemerintah dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas ZIS dalam menekan angka kemiskinan.

Hasil ini mendukung temuan sebelumnya oleh Mustika et al. (2019), yang menunjukkan bahwa ZIS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kontribusi ZIS terhadap pengurangan kemiskinan masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, serta memerlukan penguatan dalam hal akuntabilitas, pendataan mustahik, dan orientasi program yang berbasis pemberdayaan ekonomi.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Nilai *t*-hitung sebesar 2,135 lebih besar dari nilai *t*-tabel sebesar 1,99210 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,03, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara PDRB dan jumlah penduduk miskin dapat diterima. Dengan kata lain, peningkatan PDRB berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah yang diteliti.

Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi makro yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang tercermin melalui peningkatan PDRB, akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Dengan meningkatnya kapasitas produksi daerah, diharapkan terjadi *trickle-down effect* yang memungkinkan masyarakat miskin ikut menikmati hasil pertumbuhan tersebut, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan daya beli.

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu oleh Susanti (2013) dan Mustika et al. (2019), yang menyimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa PDRB dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat

Analisis regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) bersama dengan PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016–2018. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *F*hitung sebesar 2,482 yang lebih kecil dari nilai *F*tabel sebesar 3,12, serta nilai signifikansi sebesar 0,09 yang melebihi batas signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan dari kedua variabel bebas terhadap variabel jumlah penduduk miskin tidak dapat diterima secara statistik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, kontribusi simultan bersama dengan ZIS belum menunjukkan efek yang kuat dalam mempengaruhi dinamika kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Kemungkinan ini terjadi karena kontribusi ZIS terhadap ekonomi makro daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor produktif lainnya yang tercermin dalam PDRB. Selain itu, kurangnya integrasi dan harmonisasi antara program ZIS dengan kebijakan ekonomi daerah dapat menghambat terjadinya efek gabungan yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mustika et al. (2019), yang menunjukkan bahwa secara simultan, ZIS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara PDRB tetap menjadi faktor yang lebih dominan dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di daerah. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumus kebijakan agar tidak hanya mengandalkan pendekatan distribusi sosial, tetapi juga memastikan sinergi antara pendekatan ekonomi makro dan kebijakan berbasis nilai-nilai keagamaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh antara Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin dengan nilai signifikansi sebesar 0,754.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin dengan nilai signifikansi 0,03.
3. Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhinadi, Ardito. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan ke-1. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Dewi, Sri Anggadini dan Adeh Ratna Komala. 2017. Akuntansi Syariah. Bandung: Rekayasa Sains.
- Hasan, Syaikh Muhammad Ayyub. 2007. Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Alqur'an dan as-Sunnah. Cetakan ke-1. Jakarta: Niaga Swadaya
- Hasanuh, Nanu. 2011. Akuntansi Dasar Teori dan Praktik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kartika, Elsi. 2007. Pengantar hukum Zakat dan Waqaf. Jakarta: PT Grasindo
- Khomsan, Ali. 2015. Indikator Kemiskinan & Mengklasifikasi Orang Miskin. Cetakan ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sarwat, Ahmad. 2019. Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudaryana, Bambang. 2017. Metode Penelitian Cetakan ke-1. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Rahmaniar, Ani dan Soegijanto. 2016. Pengantar Akuntansi Dasar 1. Bogor: Penerbit In Media.
- Wiratna, V Sujarweni. 2016. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardana, Adhitya, dkk. 2017. Analisis Ekonomi Jawa Barat. Bandung: Unpad Press.
- Widodo. 2013. Metodologi Penelitian. Edisi 1. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali.
- Alasta, Dian, dkk. 2016. Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Zakat, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2004-2012. Vol 1, No.2. ISSN: 2528-1402.
- Eko, Yayuk. Wahyuningsih dan Zamzami. 2014. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Vol 1, No 1. ISSN : 2442-7411
- Lapopo, Jumadin. 2012. Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan Zakat Fitrah terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010. Media Ekonomi Vol. 20, No.1.
- Made, I Tony Wirawan dan Sudarsana Arka (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali tahun 2007-2013. Vol 4, No 5. ISSN : 2303-0178
- Nila, Fiky Mustika, dkk. 2019. Analysis of Effect of ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah), Regional Domestic Products of Bruto, Regional Minimum Wage and Inflation on Levels Poverty in Indonesia 2012-2016” Vol. 2, No 2. ISSN : 193-211
- Susanti, Sussy. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2009-2011. Vol 9, No. 1. ISSN : 1412-6184